

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SIDRAP (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**NURKADRI. ARW
NIM: 19.2800.025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SIDRAP (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**NURKADRI. ARW
NIM: 19.2800.025**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S. Tr. Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurkadri. Arw

NIM : 19.2800.025

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2855/In.39.8/PP.00.9/07/2022

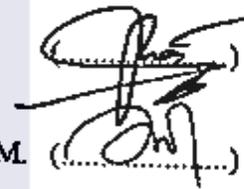
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.

NIP : 19911030 201903 1 006



Mengetahui :



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurkadri. Arw

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.025

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

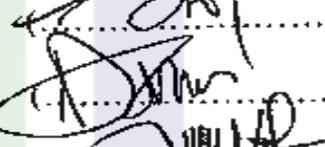
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B. 2855/ln.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) 

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. (Sekretaris) 

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.AK. (Anggota) 

Mengetahui:



Dekan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun M. Ag.
19710209 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rosmawati dan Ayahanda Anton yang telah membesarkanku, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan mengajarku arti sebuah kesabaran, kejujuran dalam hidup. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pada Ibunda dan Ayahanda tercinta kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk kalian, dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibunda dan Ayahanda.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Dosen Penasehat Akademik ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal
7. Segenap Staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
8. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, teman PPL di Kantor Imigrasi Kelas II Parepare dan teman-teman KPM Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
9. Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan serta para Staf Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Untuk saudari penulis Nelis Astina. AR, saudara Muhammad Yasmin, dan saudara Angga Anugrah yang paling berjasa setelah kedua orang tua senantiasa memberikan motivasi yang sangat baik.

11. Untuk Putri Indah Sari dan Nurhaviva Suaib yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.

12. Sulistinaini Azis, Nur Azizah Hawise, Nur Aena Mardiah selaku teman kos yang tiada hentinya setia menemani dan menyemangati dalam suka maupun duka sampai selesainya penulisan skripsi ini. Dan para sahabat penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan skripsi, Alda Prasetya AM, Meylani Akmar Nur Amaliah, Akrimnah Yusuf, Nur Atika Supardi, Nurlina. M, Sarpika, Intan Lestari, Almh Amika Cahya Sasmika, Nurul Hidayat Bt Jufri, serta teman-teman yang ada di Organisasi Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare khususnya angkatan X(10) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semuanya kita sukses.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Oktober 2023

11 Rabi'ul Akhir 1445 H

Penulis,



Nurkadri. arw
NIM. 19.2800.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkadri. Arw
NIM : 19.2800.025
Tempat/Tgl Lahir : Lt. Salo Sidrap/20 September 2001
Program Studi : Akutansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Oktober 2023

Penulis,


Nurkadri. Arw
19.2800.025

ABSTRAK

Nurkadri. Arw, *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap*. (Dibimbing oleh Hj. Syahriyah Semaun dan Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap? (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap? (3) Untuk mengetahui analisis akuntansi syariah dalam sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap?

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan studi kasus. Uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sistem informasi akuntansi dalam penyajian laporan kinerja keuangan sudah diterapkan dengan baik karena menggunakan aplikasi yang terintegrasi dan terinterkoneksi sehingga pencatatan laporan keuangan aplikasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dapat lebih cepat dan tepat. Faktor pendukung penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan yaitu adanya pelatihan akuntansi dan meningkatkan SDM (sumber daya manusia), serta fasilitas-fasilitas yang dapat membantu mempermudah mengelola data transaksi pemerintah daerah menjadi efektif dan efisien. Sedangkan faktor penghambatnya hanya kekurangan SDM (sumber daya manusia) dalam menjalankan aplikasi dan beberapa laporan yang outputnya belum tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah) telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Keuangan, dan Analisis Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Penerapan	12
2. Pengertian Sistem Informasi.....	12
3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	13
4. Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi.....	14
5. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi.....	18
6. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi.....	19

7. Teori Akuntansi Syariah.....	19
8. Unsur-unsur Sistem Akuntansi	21
9. Pengertian Kinerja Keuangan	22
10. Rasio Keuangan	24
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85
BIOGRAFI PENULIS	100

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1.	Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2022	4
2.	Belanja Daerah Kabupaten Sidrap tahun 2018-2022	5



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	38
2.	Pemetaan Fungsi Aplikasi SIPD	48



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus	85
2	Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP	86
3	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	87
4	Pedoman Wawancara	88
5	Surat keterangan wawancara	90
6	Gambaran Umum Kantor BKAD	94
7	Dokumentasi	97
8	Biodata Penulis	99



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Amzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِي	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدْوٌ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(*ج*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
الْأَنْوَاعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitin wudi'alinnasilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibaku kan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan akan tenaga kerja manusia menjadi sedikit tergeser dengan adanya pengaruh dari masuknya teknologi. Berbagai alat seperti komputer dipercaya dapat menggantikan peran sumber daya manusia dengan melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, kompetisi individu dalam perusahaan pun perlu ditingkatkan, yaitu berupa kemampuan untuk mengoperasikan teknologi. Penguasaan dan keahlian diarahkan untuk mengikuti tuntutan teknologi.¹

Dampak bagi tatanan kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya persaingan yang tinggi sehingga menuntut sumber daya manusia yang ada untuk mampu menghadapi era globalisasi. Masyarakat dituntut untuk berubah lebih maju dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan ini menjadi syarat yang penting untuk mengembangkan diri baik individu, kelompok atau suatu organisasi untuk berinteraksi.²

Hasil pengembangan teknologi informasi yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sistem informasi. Sistem informasi akan mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan, merencanakan, dan mengatur semua bagian organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik.³

Penerapan pada sistem informasi perusahaan hendaknya dapat mempertimbangkan pemakai. Sistem teknologi yang diterapkan dapat sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai. Evaluasi pemakai digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan dan kualitas jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan

¹ Sheilla Puteri Suhud and Abdul Rohman, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota Bandung" (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015).

² Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih Program Studi Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare," *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 140–54.

³ Natalie Nako, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura" (UAJY, 2016).

kecocokan tugas-tugas dengan teknologi. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari bagian bisnis, pada berbagai fungsi maupun peringkat manajerial, karena kemampuan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Dengan mengurangi ketidakpastian berarti informasi yang disampaikan pada setiap divisi tepat. Apabila informasi yang disampaikan tepat maka informasi yang dihasilkan akan tepat dan relevan untuk manajemen puncak mengambil keputusan. Bila pekerjaan yang dihasilkan dapat membantu manajemen mengambil keputusan maka kinerja karyawan tersebut dapat dinilai baik oleh manajemen.⁴

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang melaksanakan berbagai operasi dalam rangka menghasilkan informasi yang relevan, diantaranya mencatat data ekonomi, memproses dan menganalisa data serta menyajikan informasi kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan.⁵

Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan perusahaan maupun instansi pemerintahan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah berkesinambungan sebagai pondasi agar dapat menghasilkan sistem pelaporan keuangan yang baik. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi

⁴ Renaldy Lukiman and J B Widodo Lestarianto, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu Karyawan," *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi* 8, no. 2 (2016): 46–65.

⁵ Riri Yulianty Rafli, "Pengaruh Pelatihan Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Di Kota Padang)," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2013).

melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna.⁶

Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi wajib memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu dan kelompok.⁷

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi aspek sentral dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Hal itu disebabkan karena ciri utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengukur dan mengelola keuangan daerahnya. Melalui pengukuran kinerja keuangan dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan semua urusan pemerintahan secara mandiri, efektif, dan efisien, karena pada dasarnya kinerja keuangan mencerminkan tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah atas program/kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar

⁶ Zukhruf Fahri and Juliana Nasution, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum Kantor Walikota Medan," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 9, no. 2 (2021).

⁷ Onita Sari Sinaga et al., *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi* (Yayasan Kita Menulis, 2020). h. 13-14

⁸ Budhi Purwantoro Jati and Takrisia Umara Pangestu, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual," *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 24, no. 2 (2021): 231–50.

penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Melalui permendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.⁹

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap untuk tahun anggaran 2018-2022 secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut ini:

Tabel I : Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2018	1.467,34 M	1.192,42 M	81.26
2	2019	1.274,33 M	1.235,86 M	96.98
3	2020	1.301,26 M	1.186,74 M	91.20
4	2021	1.224,28 M	1.200,34 M	98.04
5	2022	1.208,51 M	1.151,12 M	95.25

Sumber Data: Laporan APBD Kab. Sidrap Tahun 2018-2022. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap terjadi pasang surut naik turun. Tahun 2018 merupakan pendapatan dengan angka tertinggi dengan total anggaran sebesar 1.467,34 M dan total realisasi sebesar 1.192,42 M, kemudian pada Tahun 2022 mengalami penurunan pada angka terendah yaitu dengan total anggaran sebesar 1.208,51 M dan total realisasi sebesar 1.151,12 M. Pada Tahun 2019 total anggaran sebesar 1.274,33 M dengan total realisasi sebesar

⁹ Dendy Syaiful Akbar and Ruhayat Ruhayat, "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah," *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2018): 93–106.

1.235,86 M dan Tahun 2021 total anggaran sebesar 1.224,28 M dengan total realisasi sebesar 1.200,34 M mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan Tahun 2020 Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dengan total anggaran sebesar 1.301,26 M dan total realisasi sebesar 1.186,74 M.

Tabel II : Belanja Daerah Kabupaten Sidrap tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2018	1.491,63 M	1.185,91 M	79.50
2	2019	1.279,67 M	1.223,44 M	95.61
3	2020	1.329,23 M	1.184,11 M	89.08
4	2021	1.268,68 M	1.199,21 M	94.52
5	2022	1.231,16 M	1.149,72 M	93.39

Sumber Data: Laporan APBD Kab. Sidrap Tahun 2018-2022. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah Kabupaten Sidrap terjadi pasang surut naik turun. Tahun 2018 merupakan pendapatan dengan angka tertinggi dengan total anggaran sebesar 1.491,63 M dan total realisasi sebesar 1.185,91 M, kemudian pada Tahun 2022 mengalami penurunan pada angka terendah yaitu dengan total anggaran sebesar 1.231,16 M dan total realisasi sebesar 1.149,72 M. Pada Tahun 2019 total anggaran sebesar 1.279,67 M dengan total realisasi sebesar 1.223,44 M dan Tahun 2021 total anggaran sebesar 1.268,68 M dengan total realisasi sebesar 1.199,21 M mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan Tahun 2020 Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dengan total anggaran sebesar 1.329,23 M dan total realisasi sebesar 1.184,11 M.

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat kita lihat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Sidrap secara rata-rata mengalami penurunan dapat dikatakan tidak stabil. Seperti yang kita ketahui bersama setiap daerah wajib meningkatkan kualitas setiap daerah baik, dari segi pendapatan maupun belanja daerahnya. Maka dari itu, dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam pemenuhan dan penyediaan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berkepentingan. Semakin baik sistem informasi

akuntansi yang diterapkan, maka semakin meningkat kinerja yang di dapatkan dalam memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Melihat dari masalah diatas maka peneliti mencoba untuk merumuskan judul penelitian yaitu “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana analisis akuntansi syariah dalam sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap
3. Untuk mengetahui analisis akuntansi syariah dalam sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap

D. Kegunaan Penelitian

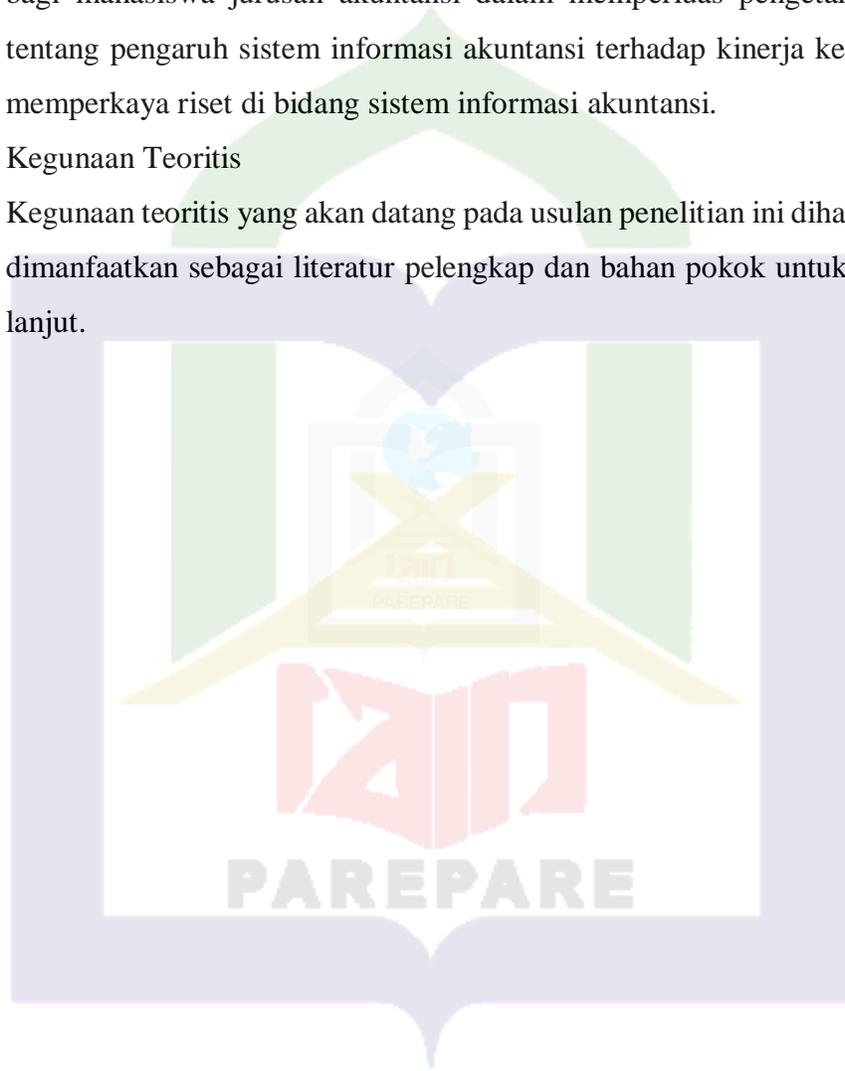
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam memperluas pengetahuan mereka tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan serta memperkaya riset di bidang sistem informasi akuntansi.

2. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang akan datang pada usulan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai literatur pelengkap dan bahan pokok untuk kajian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bagian ini peneliti akan menggunakan penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi sebagai acuan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Maisur Nyak Umar “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial”. Hasil penelitian ini yaitu penerapan sistem informasi akuntansi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan bahwa dengan adanya penerapan SIA dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dari berbagai komponen. Penggunaan SIA tidak hanya mempermudah bagi para manajer, namun terhadap para karyawan juga sangat dirasakan.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan sistem informasi akuntansi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti terlihat pada penekanan penelitian dan tempat penelitian yang berbeda yang mana penelitian di atas lebih berfokus dalam meneliti mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penulis hanya meneliti penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.

2. Yenni Vera Fibriyanti “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus

¹⁰ Maisur Nyak Umar, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kabupaten Pidie),” *Jurnal Real Riset* 1, no. 1 (2019).

pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bagian akuntansi masih bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan serta masih bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan membuat rekap daftar hadir karyawan sehingga memungkinkan adanya penyelewengan. Praktek yang sehat yang diterapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian intern adalah gaji pokok karyawan dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok ke rekening masing-masing karyawan oleh direktur dan slip gaji dibuat rangkap dua.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah masing-masing meneliti terkait sistem informasi akuntansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lokasi penelitian serta penekanan penelitian, penelitian dengan judul dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya) tersebut lebih berfokus pada menganalisa sistem informasi akuntansi penggajian yang telah diterapkan PT. Populer Sarana Medika dan juga untuk menganalisa sistem informasi akuntansi penggajian pada efektivitas pengendalian internal, sdangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah).

3. Tommy L.H. Tumulun dan Sonny Pangerapan “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit di PT Nusantara Sakti Cabang Manado”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penerapan fungsi sistem informasi akuntansi penjualan kredit harus dipisahkan antara setiap fungsi yang ada, yaitu fungsi akuntansi dan fungsi kas harus dipisahkan. Dengan pemisahan fungsi maka akan mengurangi kecurangan yang ada dan

¹¹ Yenni Vera Fibriyanti, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya),” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 2, no. 1 (2017).

bisa mendapatkan hasil pekerjaan yang efektif dan efisien, 2) fungsi kredit harus bekerja sesuai standar yang ditentukan. Dalam pemberian persetujuan kredit harus benar-benar berdasarkan standar yang ada. Jangan hanya berpikir dan mau menjual motor yang banyak dan mencapai target yang ada dan akhirnya berdampak buruk pada pembayaran angsuran. Ketika pemberi kredit sesuai standar dan tidak ada manipulasi data, maka akan mengurangi tindak kredit macet, 3) Fungsi kredit harus melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak untuk memperkuat pemohon kredit memenuhi standar 3C+1P atau tidak. Pihak yang dapat dilakukan konfirmasi seperti kepada tetangga, keluarga, teman, dan juga tempat kerja pemohon kredit.¹²

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti sistem informasi akuntansi serta teknik pengumpulan data masing-masing dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah lokasi yang menjadi objek penelitian dan juga fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah). Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya lebih berfokus tentang Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit di PT Nusantara Sakti Cabang Manado.

4. Galang Rahadian Prabowo, Amir Mahmud, dan Henny Murtini “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung)”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan: Tidak berpengaruh positif dan signifikan antara keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara

¹² Tommy L H Tumulun and Sonny Pangerapan, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di PT Nusantara Sakti Cabang Manado,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019).

individual. Tidak berpengaruh positif dan signifikan antara kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara individual. Tidak berpengaruh positif dan signifikan antara dukungan pimpinan bagian terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara individual. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi secara individual.¹³

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem informasi akuntansi. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu lokasi objek penelitian dan juga fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah). Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya lebih berfokus pada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung). Perbedaan lainnya yaitu penelitian Galang Rahadian Prabowo, Amir Mahmud, dan Henny Murtini ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif sehingga teknik pengolahan data dan teknik analisis data dari kedua penelitian ini juga pasti berbeda.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, dan metode atau jenis penelitian. Penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan subjek penelitiannya adalah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian terdahulu tidak ada yang melakukan penelitian di tempat yang sama dengan

¹³ Galang Rahadian Prabowo, Amir Mahmud, and Henny Murtini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung)," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 1 (2014).

subjek yang sama.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

a. Pengertian penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan ialah perbuatan menerapkan. Lalu menurut para ahli, penerapan ialah perbuatan mengaplikasikan suatu cara atau teori agar tujuan dan kepentingan kelompok yang telah tersusun dapat tercapai.¹⁴

b. Unsur-unsur penerapan

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁵

2. Pengertian Sistem Informasi

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari produser-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki manfaat atau belum memiliki arti guna. Sistem informasi adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan/bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan guna menyelesaikan suatu masalah yang memiliki manfaat atau nilai guna bagi orang yang membutuhkannya.

Sistem informasi menurut John F. Nash, “Sistem informasi adalah

¹⁴ Tri Lestari, *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial* (Jakarta Selatan: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023). h. 49

¹⁵ Sri Belia Harahap, *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). h. 54

kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat”.

Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi”.¹⁶

3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi dapat dipandang sebagai sistem informasi dan bahasa bisnis. Akuntansi sebagai sistem informasi berfungsi memproses data dari lingkungannya (dari lingkungan eksternal, misalnya perusahaan atau organisasi lain, pemerintah, pemasok, pelanggan, kreditor, pemilik atau pemegang saham, dan pihak eksternal lain-lainnya, serta dari lingkungan internal) dengan cara mengukur dan mencatat, meringkasnya menjadi informasi atau laporan-laporan kepada pihak-pihak internal dan eksternal secara kuantitatif (keuangan dan nonkeuangan) serta kualitatif. Akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai suatu entitas bisnis (privat) dan entitas nirlaba (sektor publik) untuk membantu para pengguna internal dan pengguna eksternal dalam membuat keputusan.¹⁷

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan dan informasi lainnya yang diperoleh dari pengumpulan

¹⁶ Yulia Djahir, “Sistem Informasi Manajemen” (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.14.

¹⁷ R.A. Supriyono, “Akuntansi Keperilakuan” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.4.

dan pengelolaan data transaksi secara akurat.¹⁸

Menurut Gelinus Dull, sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses data transaksi perusahaan yang berisi informasi laporan keuangan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat dikumpulkan dan dicatat secara manual dengan tulisan tangan, dengan menggunakan komputer, atau kombinasi antara keduanya.

Menurut Wilkinson dan Cerullo menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan struktur integral dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi akuntansi yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari para pengguna.¹⁹

4. Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memproses, mengambil, dan melaporkan data keuangan. AIS dapat digunakan oleh *akuntan, konsultan, analis bisnis, manajer, chief financial officer, auditor, dan regulator*. Sebuah SIA membantu departemen yang berbeda dalam sebuah perusahaan bekerja sama. SIA yang efektif menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan dan mengambil data secara efektif. Kontrol internal dan eksternal AIS sangat penting untuk melindungi data sensitif perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah cara melacak semua akuntansi dan aktivitas bisnis untuk sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi umumnya terdiri dari enam komponen utama: orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal. Berikut

¹⁸ Firman Sarfina and Andi Ayu Frihatni, "Implementation of Accounting Information System The Selling in PT. Sepuluh Perkasa Bersatu Unggul Sidrap (Accounting Sharia Analysis)," n.d.

¹⁹ Mia Lasmi Wardiyah, "Akuntansi Keuangan Menengah" (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), h.70.

komponen-komponen dalam SIA:

a. Orang SIA

Orang-orang di SIA adalah pengguna sistem. Sebuah SIA membantu departemen yang berbeda dalam sebuah perusahaan bekerja sama. Profesional yang mungkin perlu menggunakan SIA organisasi meliputi:

- 1) Akuntan
- 2) Konsultan Analisis bisnis
- 3) Manajer kepala petugas keuangan
- 4) Auditor

Dengan SIA yang dirancang dengan baik, setiap orang dalam suatu organisasi dapat mengakses sistem yang sama dan mengambil informasi yang sama. SIA juga menyederhanakan proses pelaporan informasi kepada orang-orang di luar organisasi, bila diperlukan. Misalnya, konsultan mungkin menggunakan informasi dalam SIA untuk menganalisis efektivitas struktur harga perusahaan dengan melihat data biaya, data penjualan, dan pendapatan. Selain itu, auditor dapat menggunakan data untuk menilai pengendalian internal perusahaan, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan seperti *sarbanes-Oxley Act (SOX)*.

b. Prosedur dan Instruksi

Prosedur dan intruksi SIA adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan memproses data. Metode ini manual dan otomatis. Data dapat berasal dari sumber internal (Misalnya, karyawan) dan sumber eksternal (Misalnya, pesanan online pelanggan). Prosedur dan intruksi akan dikodekan ke dalam perangkat lunak AIS. Namun, prosedur dan intruksi juga harus “dikodekan” kedalam karyawan melalui dokumentasi dan pelatihan. Prosedur dan intruksi harus di ikuti secara konsisten agar efektif.

c. Data SIA

Sebuah SIA harus memiliki struktur database untuk menyimpan

informasi, seperti bahasa *query terstruktur (SQL)*, yang merupakan bahasa komputer yang biasa digunakan untuk database. SQL memungkinkan data yang ada di SIA untuk di manipulasi dan diambil untuk tujuan pelaporan. AIS juga akan membutuhkan berbagai layar input untuk berbagai jenis pengguna sistem dan entry data, serta format output yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Dan berbagai jenis informasi. Data yang terkandung dalam SIA adalah semua informasi keuangan yang berkaitan dengan praktik bisnis organisasi. Setiap data bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan harus dimasukkan ke dalam SIA.

Jenis data yang disertakan dalam SIA bergantung pada sifat bisnis, tetapi dapat terdiri dari berikut ini:

- 1) Pesanan penjualan
- 2) Laporan tagihan pelanggan
- 3) Laporan analisis penjualan permintaan pembelian
- 4) Faktor vendor
- 5) Periksa register
- 6) Jurnal umum D
- 7) Data inventaris
- 8) Informasi penggajian
- 9) Ketepatan waktu I
- 10) Informasi pajak

d. Perangkat lunak SIA

Komponen perangkat lunak SIA adalah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, memproses, dan menganalisis data keuangan perusahaan. Sebelum ada komputer, SIA adalah sistem manual berbasis kertas, tetapi saat ini, sebagian besar perusahaan menggunakan perangkat lunak komputer sebagai dasar AIS. Usaha kecil mungkin menggunakan *intuit's Quickbooks* atau *Sage's Sage 50 Accounting*, tetapi ada yang lain. 56 usaha kecil hingga menengah mungki

menggunakan *SAP Business one*. 7 bisnis menengah dan besar mungkin menggunakan *Microsoft Dinamis GP*, 8 *MAS 90*, 9 *Sage Group* atau *MAS 200*, *PeopleSoft Oracle*, 10 atau *Epicor financial manajemen*.

Kualitas, keandalan, dan keamanan adalah komponen kunci dari perangkat lunak SIA yang efektif. Manajer mengandalkan informasi yang dihasilkannya untuk membuat keputusan bagi perusahaan, dan mereka membutuhkan informasi berkualitas tinggi untuk membuat keputusan yang tepat. Program perangkat lunak AIS dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dari berbagai jenis bisnis. Jika program yang ada tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, perangkat lunak juga dapat dikembangkan sendiri dengan masukan substansial dari pengguna akhir atau dapat dikembangkan oleh perusahaan pihak ketiga khusus untuk organisasi.

e. Infrastruktur TI

Infrastruktur teknologi informasi hanyalah nama mewah untuk perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Sebagian besar item perangkat keras ini harus dimiliki oleh bisnis dan dapat mencakup yang berikut: komputer perangkat seluler server printer pelindung gelombang router media penyimpanan catu daya cadangan selain biaya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perangkat keras termasuk kecepatan, kemampuan penyimpanan, dan apakah itu dapat diperluas dan ditingkatkan. Mungkin yang paling penting, perangkat keras yang di pilih untuk AIS harus kompatibel dengan perangkat lunak yang di maksud.

f. Kontrol internal

Kontrol internal AIS adalah tindakan keamanan yang dikandungnya untuk melindungi data sensitif. Ini bisa sesederhana kata sandi atau serumit indentifikasi biometrik. Protokol keamanan biometrik mungkin termasuk menyimpan karakteristik manusia yang tidak berubah seiring waktu, seperti sidik jari, suara, dan pengenalan wajah. SIA harus memiliki kontrol internal

untuk melindungi terhadap akses komputer yang tidak sah dan untuk membatasi akses ke pengguna yang berwenang, yang mencakup beberapa pengguna di dalam perusahaan. Itu juga harus mencegah akses file yang tidak sah oleh individu yang diizinkan untuk mengakses hanya bagian tertentu dari sistem.

AIS berisi informasi rahasia yang tidak hanya milik perusahaan tetapi juga milik karyawan dan pelanggannya. Data ini mungkin termasuk:

- 1) Nomor jaminan sosial
 - 2) Gaji dan informasi personalia
 - 3) Nomor kartu kredit
 - 4) Informasi pengguna
 - 5) Data keuangan perusahaan
 - 6) Informasi keuangan pemasok dan vendor.²⁰
5. Fungsi Sistem Informasi Akutansi

SIA yang baik dibuat sedemikian rupa, sehingga mampu berfungsi dalam menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, disiplin waktu dan dapat dipercaya. Disamping itu dalam SIA juga terdapat unsur fungsi kontrol sehingga dapat mengurangi adanya ketidaksesuaian atau ketidakpastian atas penyampaian informasi.

Fungsi SIA menurut (Romney and Paul John Steinbart) menerangkan bahwa fungsi SIA adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyimpan data mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan perusahaan, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas.
- b. Data diubah menjadi informasi yang dapat digunakan unsur manajemen dalam menghasilkan keputusan berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

²⁰ Renika Hasibuan dkk, "Sistem Akuntansi" (Padang Sumatera Barat: PT GBLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), h.33-37.

pemeriksaan dan evaluasi.

- c. Menyediakan kontrol yang cukup dalam menjaga sumberdaya entitas perusahaan, mencakup informasi yang ada di perusahaan dan memastikan data dimaksud ada ketika dibutuhkan serta akurat dan andal.²¹

6. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Sistem akuntansi adalah sistem informasi, atau salah satu subset/subsistem dari suatu sistem informasi organisasi.

Menurut Mulyadi, sistem informasi ini memiliki empat tujuan dalam penyusunannya yaitu:

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.²²

7. Teori Akuntansi Syariah

- a. Pengertian akuntansi syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan

²¹ Mardia et al., *Sistem Informasi Akuntansi & Bisnis* (Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 22

²² Siti Munasasa Hidayat, "Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai GAS LPG Pada PT. RUKUN," *Politeknik Komputer Niaga LPKIA Bandung*, 2018.

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.²³

b. Prinsip-prinsip akuntansi syariah

Adapun prinsip-prinsip umum akuntansi syariah di bawah ini, yaitu :

1) Prinsip pertanggungjawaban

Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslim, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan Sang Kholiq mulai dari alam kandungan hingga ia kembali lagi pada-Nya. Sebab, Allah swt. Menciptakan manusia sebagai kholifah di muka bumi dan inti dari kekholidahan itu ialah menjalankan atau menunaikan amanah. Jadi, implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya bias berbentuk laporan akuntansi.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*: Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang

²³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Salemba Empat, 2009). h. 2

disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua:* Kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral)

3) Prinsip kebenaran

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.²⁴

8. Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Berikut merupakan unsur-unsur dari system akuntansi tersebut:

a. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainnya. Pada jurnal, terdapat pula kegiatan peringkasan data yang hasil ringkasannya tercantum ke rekening dalam buku besar. Contoh dari jurnal ini adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas.

b. Buku Besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan dalam meringkas data keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur informasi apa yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

c. Buku Pembantu

Seperti namanya, buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Baik buku besar ataupun buku pembantu menjadi catatan akuntansi akhir yang artinya tidak ada catatan akuntansi lain sesudah data akuntansi digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Contoh buku

²⁴ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah* (GUEPEDIA, n.d.). h. 21-22

pembantu adalah buku pembantu piutang yang merinci semua data debitur.

d. Laporan

Seperti namanya, laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan ini dapat berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, daftar utang yang akan dibayar, dan lain sebagainya.²⁵

9. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja secara etimologi Sadalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *performance*. *Performance* berasal dari kata “*to perform*” yang mempunyai arti masukan (*entries*). Banyak sekali penjelasan tentang makna entries ini dari berbagai pengertian tentang masukan yang relevan dengan pengertian kinerja.

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja dimasa lalu, dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisis keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut.²⁶ Kesimpulannya adalah bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al- Ahqaaf ayat 19

مُؤَنَ يُظَلُّ لَا وَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلِيُؤَقِّبَهُمُ عَمَلُهُمْ مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Terjemahnya :

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah

²⁵ Zaenal Aripin, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2021). h. 12-13

²⁶ Yusrianti Hanike and Damirah Damirah, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan Struktural Equation Model–Partial Least Square,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2019).

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.²⁷

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Secara umum kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan merupakan hal terpenting bagi pelaku bisnis karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan akan tetap terus berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna* (Jakarta:As-Samad), h. 504

- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- d. Pertanggungjawaban yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

10. Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam angka/persentase. Menurut Kasmir, jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas sering juga disebut sebagai rasio modal kerja yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Caranya yaitu dengan membandingkan seluruh komponen yang ada pada asset lancar dengan komponen di passiva lancar (utang jangka pendek).

Jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu:

1) Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Asset

²⁸ Syahriyah Semaun, "Aspek Hukum Dalam Audit Koprasi," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (2010): 94–104.

lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aset lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka, pinjaman yang diberikan, pendapatan yang masih harus dibayar, dan aset lainnya. Utang lancar merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Komponen utang lancar meliputi utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang deviden, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, dan utang jangka pendek lainnya. Rumus rasio lancar (*current ratio*) sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2) Rasio cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya (utang lancar) dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Rasio cepat yang umumnya dianggap baik adalah 1 (satu) atau berada diatas rata-rata industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik dari perusahaan, karena perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi cukup menjual surat berharga atau penagihan piutang. Menjual persediaan dengan harga normal relative sulit, kecuali perusahaan menjual dibawah harga pasar, yang tentunya akan menambah kerugian bagi perusahaan. Rumus rasio cepat (*Quick Ratio*) sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)} - \text{Persediaan (Inventory)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

3) Rasio kas (*Cash Ratio*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau membayar utangnya. Ketersediaan kas dapat ditunjukkan dari tersedianya

dana kas atau setara kas, seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Rumus rasio kas (*Cash Ratio*) sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas (Cash) atau setara kas (Cash Equivalent)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

4) Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan atau ketersediaan kas yang dibutuhkan untuk membayar tagihan (utang) dan membiayai penjualan. Apabila rasio perputaran kas cepat, karena penjualan tinggi, uang masuk dan keluar relative seimbang sehingga kemampuan membayar seluruh tagihan dapat dilakukan sesuai waktunya. Sebaliknya, apabila perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aset sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus rasio perputaran kas (*cash turn over*) sebagai berikut:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih (Net Sales)}}{\text{Modal Kerja Bersih (Not Working Capital)}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Cash turn over} = \frac{\text{Penjualan Bersih (Net Sales)}}{\text{Aset Lancar (Current Assets) - Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100\%$$

5) *Inventory to Net Working Capital*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aset lancar dengan utang lancar. Jika *inventory to net working capital* perusahaan berada diatas rata-rata *inventory to net working capital* industry, maka dapat dikatakan bahwa kondisi perusahaan baik. Rumus *Inventory to Net Working Capital* sebagai berikut:

$$\text{Net Working Capital} = \frac{\text{Persediaan (Inventory)}}{\text{Aset Lancar (Current Assets)} - \text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100\%$$

b. Rasio Leverage/Solvabilitas (*Leverage Ratio*)

Rasio Leverage atau solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dapat dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Apabila perusahaan memiliki rasio leverage tinggi, maka berdampak timbulnya risiko kerugian yang lebih besar, tetapi mempunyai kesempatan mendapat laba lebih besar. Sebaliknya, apabila rasio solvabilitas lebih rendah, maka mempunyai risiko kerugian lebih kecil, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Jenis-jenis rasio leverage/solvabilitas, yaitu:

1) *Debt to assets ratio (Debt Ratio)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit perusahaan dalam memperoleh tambahan utang dan dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aset yang ada. Sebaliknya, jika rasio terlalu rendah, maka semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Rumus debt ratio sebagai berikut:

$$\text{Debt ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}} \times 100\%$$

2) *Debt to equity ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui berapa modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, maka

semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Rumus *debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Total Equity)}} \times 100\%$$

3) *Long term debt to equity ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus *long term debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang (Long term debt)}}{\text{Ekuitas (equity)}} \times 100\%$$

4) *Times Interest Earned Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat dijadikan ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasio rendah, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan biaya lainnya. Rumus *Times Interest Earned*, sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Interest Tax (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

Atau

$$\begin{aligned} \text{Times Interest Earned} \\ = \frac{\text{Earning Before Tax (EBT)} + \text{Biaya Bunga (Interest)}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}} \end{aligned}$$

5) *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rumus *Fixed Charge Coverage*, sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

c. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya atau aset yang dimilikinya. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas, menunjukkan apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau sebaliknya. Jenis-jenis rasio aktivitas, yaitu:

1) Perputaran piutang (*Receivable Turn Over*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah berarti ada *over investment* dalam piutang. Rumus *Receivable Turn Over*, sebagai berikut:

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}}$$

2) Perputaran sediaan (*Inventor turn over*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*inventory*) berputar dalam suatu periode. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek. Sebaliknya semakin tinggi rasio ini, menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan likuid persediaan semakin baik. Rumus *Inventory turn over*, sebagai berikut:

$$\text{Inventory turn over} = \frac{\text{Harga Pokok Barang yang dijual}}{\text{Persediaan}}$$

Atau

$$\text{Inventory turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

3) Perputaran modal kerja (*Working Capital Turn Over*)

Merupakan rasio untuk mengukur keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Apabila hasilnya rendah, dapat diartikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini karena rendahnya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu besar, demikian sebaliknya. Rumus *Working Capital Turn Over*, sebagai berikut:

$$\text{Working capital turn over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata - rata Modal Kerja}}$$

Atau

$$\text{Working capital turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}}$$

4) Perputaran aset tetap (*Fixed Assets Turn Over*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang di tanamkan di aset tetap berputar dalam satu periode. Rumus *Fixed Assets Turn Over*, sebagai berikut:

$$\text{Fixed assets turn over} = \frac{\text{Penjualan (Sales)}}{\text{Total Aset Tetap (Total Fixed Assest)}}$$

5) Perputaran aset (*Assest Turn Over*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aset. Rumus *Assest Turn Over*, sebagai berikut:

$$\text{Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan (Sales)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}}$$

d. Rasio profitabilitas (*Profitability Ratio*)/Rasio Rentabilitas

Rasio profitabilitas adalah yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama periode tertentu. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, dapat dikatakan telah berhasil mencapai target, dan sebaliknya. Rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Jenis-jenis rasio profitabilitas,

yaitu:

1) Margin Laba (*Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rumus *Profit Margin*, sebagai berikut:

Untuk Margin, sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Penjualan Bersih} - \textit{Harga Pokok Penjualan}}{\textit{Penjualan (Sales)}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

Untuk Margin Laba Bersih

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\textit{Penjualan (Sales)}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan.

2) *Return On Investment (ROI)*

Merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin tinggi nilai ROI menunjukkan semakin baik kondisi perusahaan. Rumus *Return On Investment*, sebagai berikut:

$$\textit{ROI} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\textit{Total Assets}}$$

3) *Return On Equity (ROE)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik kondisi perusahaan. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan demikian sebaliknya. Rumus *Return On Equity*, sebagai berikut:

$$\textit{ROE} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\textit{Equity}}$$

4) Laba per lembar saham

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam

mencapai keuntungan.²⁹

Rumus Laba per Lembar Saham, sebagai berikut:

$$\text{Laba per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- A'raaf ayat 39

تَكْسِبُونَ كُنْتُمْ بِمَا الْعَذَابَ فَذُوقُوا فَضْلًا مِنْ عَلَيْنَا لَكُمْ كَانَ فَمَا لِأَخْرَابِهِمْ أُولَئِهِمْ وَقَالَتْ

Terjemahnya :

“Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: “Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan”.³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.

C. Kerangka Konseptual

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat

²⁹ Syaiful Bahri, *Analisis Laporan Keuangan* (Jawa Barat: CV MEDIA SAINS INDONESIA, 2023). h. 106-109

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna* (Jakarta:As-Samad), h.155

menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.³¹

b. Jenis-jenis laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari 4 (empat) laporan dasar, yaitu neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Berikut ini adalah keterangan satu per satu.

- 1) Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva/harta (*assets*), kewajiban (*liabilities*), dan modal sendiri (*equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal/waktu tertentu. Atau dengan kata lain Neraca berisi mengenai data-data informatif mengenai kondisi perusahaan pada waktu tertentu.
- 2) Laporan rugi laba adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, biaya selama masa itu, dan keuntungan atau kerugian yang diderita selama periode tersebut (misalnya; satu bulan, per kuartal, per tahun, dsb).
- 3) Laporan perubahan modal/laba ditahan, untuk mengetahui perubahan besarnya modal sendiri selama suatu periode akuntansi perlu disusun Laporan Modal Sendiri (*Statement Of Owner Equity*). Laporan ini terdapat pada perusahaan perseorangan (*Single proprietorship*), umumnya berbentuk PD (Perusahaan Dagang) dengan cara memperhitungkan pendapatan bersih yang diterima atau kerugian bersih yang diderita, pemakaian prive, dan penambahan modal oleh pemilik bilamana ada.
- 4) Laporan arus kas, laporan Arus Kas menghubungkan antara 2 Neraca dengan Laporan laba/rugi periode terakhir yang dapat mengevaluasi berapa banyak uang kas yang dihasilkan perusahaan dan untuk apa

³¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2016). h. 3

saja uang kas tersebut telah digunakan.³²

2. Laporan Keuangan Daerah

a. Pengertian laporan keuangan daerah

Pengertian keuangan daerah dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.³³

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan keteetannya terhadap peraturan perundang-undangan.³⁴

b. Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang

³² Arief Sugiono, Yanuar Nanok Soenarno, and Synthia Madya Kusuma Kusumawati, *Akuntansi & Pelaporan Keuangan* (GRASINDO, n.d.). h. 9-17

³³ Kusno Hadiutomo, *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi* (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2021). h. 151

³⁴ Syahril Effendi, *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah* (CV BATAM PUBLISHER, 2021). h. 10

dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.³⁵

Objek kajian dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di satwan kerja perangkat daerah (SKPD) Pangkajene Sidrap. Yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan beberapa teori tentang sistem informasi akuntansi dan beberapa teori tentang kinerja keuangan dengan menggunakan teori tersebut dapat membantu dalam meneliti dampak sistem informasi terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap.

Bagan yang dibuat adalah cara berfikir peneliti guna mempermudah pembaca dalam berfikir sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun bagan yang dibuat terkait tidak terlepas dari judul penelitian “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”.

Berdasarkan kerangka pikir peneliti meneliti tentang komponen-komponen

³⁵ Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah* (Malang: CV IRDH, 2019). h. 13-29

sistem informasi akuntansi dan penerapannya pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap. Masalah yang diangkat yaitu dampak dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap. Untuk menjawab masalah yang di angkat peneliti, peneliti menggunakan teori sistem informasi akuntansi dan teori kinerja keuangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.



D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antar variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.³⁶



2. 1 Bagan Kerangka Pikir

³⁶ Muhammad Kamal Zubair et al., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu.³⁷ Oleh sebab itu, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu studi kasus yang artinya selama proses penelitian, penulis akan lebih banyak mengadakan kontak dengan pihak-pihak yang berada di lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan mendapatkan data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap. Pengambilan dan pemilihan tempat dan daerah penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan responden, mengingat peneliti juga dari Sidrap. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta ada

³⁷ Lexy J Metodologi, "Penelitian Kualitatif," Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

surat izin untuk penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan, dimana peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi acuan dalam mendukung kegiatan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui produser statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumbernya yaitu para pegawai bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang bekerja di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui

dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi.³⁸

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.³⁹ Misalnya selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, foto. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dimana dalam observasi menghimpun data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau

³⁸ Fitriyah Nur Hsb and Hazmanan Khair, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen Dan Keterampilan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kominfo Labuhanbatu Utara," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 15–30.

³⁹ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 20, no. 1 (2013): 82–92.

subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dimana dalam wawancara ini melibatkan beberapa pihak yang ada dalam kantor bupati tersebut, seperti karyawan yang bertugas dibagian tersebut. Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, atau pada wawancara ini hanya pada pokok permasalahan yang ditanyakan. Dimana dalam wawancara ini merupakan kontak langsung atau tatap muka yang dilakukan oleh pencari informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.⁴⁰

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu diuji keabsahan datanya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil

⁴⁰ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan produser triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan dari informan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan, lapangan, foto, atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan merealisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan. Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada

⁴¹ Dina Fatma Adriyani, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1," *Di Akses Pada* 12 (2003).

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁴²

⁴² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah).

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah) yang diperoleh dengan indikator penerapan dari hasil wawancara, antara lain:

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi keuangan di pemerintah daerah?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan
“Sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah ini sudah terintegrasi secara nasional jadi dia sudah menggunakan suatu sistem untuk semua pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota di Indonesia namanya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah)”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub, sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah Kabupaten Sidrap sudah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini sudah dijalankan di seluruh Kabupaten Kota dan telah terintegrasi secara nasional serta dapat mempermudah para staf jika membuat pelaporan.

⁴³ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Untuk pemerintah daerah Sidrap untuk tahun ini sudah menggunakan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) jadi nanti ini aplikasi terintegrasi sampai pusat dan mempunyai kewajiban pelaporan bukan hanya laporan keuangan tiap tahun tapi ada laporan kinerja setiap bulan dan setiap bulan itu dilaporkan ke pusat dengan mekanisme interkoneksi menggunakan SIPD itu jadi, pelaporannya tidak manual”.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Wdhiani menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan, semesteran dan tahunan. SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan yang saling terhubung dan dapat di akses melalui situs jaringan resmi kementerian dalam negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam menyatukan data perencanaan, keuangan, dan peaporan daerah. Oleh karenanya pemda tidak perlu membuat aplikasi baru, sebab SIPD telah mengintegrasikan seluruh proses perencanaan pembangunan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan pemda.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Di pemerintah daerah kan ada dua kementerian yang membawahi. Ada kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan nah, kewajiban pelaporan wajib di kementerian keuangan setiap bulan itu laporan kinerja, modelnya dia interkoneksi dari kementerian keuangan ke servernya SIPD terkait dengan penerapan sistem informasi di pemerintah daerah”.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah, setiap pemerintah daerah wajib melakukan pelaporan di kementerian keuangan yaitu laporan kinerja setiap bulan.

⁴⁴ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁴⁵ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Setiap pelaporan tersebut sudah terkoneksi dari kementerian keuangan ke servernya sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh Indonesia datanya menjadi satu, kemudian juga prosesnya sama. Yang pertama untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan. Dengan ada SIPD, data seluruh Indonesia baik rencana pembangunannya, musrenbang, kemudian tata kelola keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, mulai dari tata kelola, baik itu akuntansi pelaporannya, kemudian penata usahaannya, terintegrasi semuanya satu data.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi “Sistem informasi pemerintah daerah sudah menggunakan interkoneksi yang sudah terintegrasi servernya di kementerian jadi setiap pemerintah daerah cuma di kasih akun jadi, setiap yang di input di kabupaten kota informasinya akan tertarik langsung ke server yang ada di kementerian”.⁴⁶

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa sistem informasi pemerintah daerah sudah terinterkoneksi dan terintegrasi secara nasional menggunakan aplikasi SIPD (sistem informasi pemerintah daerah). Selama ini daerah membuat sistemnya sendiri-sendiri. Buat aplikasinya sendiri-sendiri, ada yang membuat aplikasi tentang perencanaan, ada yang membuat aplikasi tentang keuangan, semuanya buat aplikasi. Dengan adanya SIPD, daerah tidak perlu membuat aplikasi sistem tadi. Dengan adanya SIPD ini, cukup kemendagri saja yang buat sistemnya, yang membiayai tinggal pemerintah daerah menggunakan sehingga dengan adanya SIPD menghemat biaya. Daerah tidak perlu menganggarkan, dan ada penghematan yang luar biasa yang dijalankan semua pemerintah daerah diseluruh kabupaten kota di Indonesia seperti yang terlihat pada gambar berikut :

⁴⁶ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).



2.2 Pemetaan Fungsi Aplikasi SIPD

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam mengukur kinerja keuangan?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

“Dengan adanya sistem terintegrasi itu maka tentunya pengukuran kinerja akan lebih cepat dan akan lebih tepat karena dia rill beasistem pencatatannya setiap saat kita bisa mengirim informasi yang rill jadi pengukuran kinerja bisa lebih cepat dan tepat”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fadli Yakub, dengan adanya SIPD tentunya dapat lebih mudah dalam hal pengukuran kinerja karena akan lebih cepat dan tetap karena pencatatannya sudah rill beasistem sehingga tidak ada kecurangan dalam pengukuran kinerja. Dalam sistem tersebut juga, waktu yang diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih singkat. Tenaga yang

⁴⁷ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

diperlukan sangat jauh berkurang, dan jauh lebih hemat karena tidak perlu menggunakan kertas sama sekali.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“ Dalam mengukur kinerja keuangan memang sistem informasi akuntansi sangat berperan penting karena menghasilkan laporan keuangan yang diolah sehingga pengukuran kinerja akan lebih cepat dan tepat”.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa program sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang diolah sehingga memperoleh informasi yang akurat dan pengukuran kinerjanya akan lebih cepat dan tepat. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari penggunaan SIPD diantaranya, tidak ada lagi duplikasi penganggaran, penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan kegiatan utama, serta mempermudah pengawasan dan audit. Disisi lain, melalui SIPD anggaran daerah dapat dihemat. Sebab, daerah tidak perlu lagi menganggarkan aplikasi atau sistem ke dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi berperan dalam mengukur kinerja keuangan sehingga bisa dikatakan dalam kondisi yang baik perlu juga adanya berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah menjelaskan bahwa kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal regulasi, sistem dan sumber-sumber pendapatan di daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan. Salah satu aspek untuk

⁴⁸ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁴⁹ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

melihat perkembangan daerah yaitu melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio sangat dibutuhkan dalam hal menganalisis sistem informasi akuntansi dalam mengukur kinerja keuangan agar dapat diketahui kondisinya baik atau tidak.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi
“Mengenai analisis rasio merupakan bentuk peranan yang dijalankan sistem informasi akuntansi itu sendiri dalam mengukur kinerja keuangan yang tepat dan cepat pencatatan laporan keuangannya yang riil adanya”.⁵⁰

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa tujuan sistem pengukuran kinerja adalah pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, kedua untuk mengatur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi, ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Dari berbagai alat analisis yang ada, analisis rasio merupakan alat analisis yang sering dipakai karena merupakan metode paling tepat dan cepat untuk diterapkan dalam kinerja suatu perusahaan, analisis rasio juga menghasilkan informasi yang lebih mudah dibuat dan di tafsirkan dari pada laporan keuangan yang rinci dan rumit.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai laporan apa saja yang dihasilkan dalam sistem informasi akuntansi?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

⁵⁰ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

“Laporan yang dihasilkan adalah laporan keuangan, laporan yang ada di pemerintah daerah itu ada 7(tujuh) namanya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan kas, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan”.⁵¹

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa ada 7(tujuh) laporan yang digunakan pemerintah daerah yaitu, laporan realisasi anggaran terbagi menjadi laporan perubahan kas, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Calk. Dengan kata lain, segala bentuk transaksi yang terjadi pada suatu bisnis atau perusahaan, mulai dari transaksi pembelian, penjualan, serta transaksi keuangan lainnya, semuanya akan tercatat dalam jenis laporan keuangan. Biasanya, laporan ini dibuat dalam kurun waktu atau periode tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu tahun sekali.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Dalam sistem informasi akuntansi semua kebutuhan laporan untuk pemerintah daerah dan kewajiban pelaporan semua dihasilkan di sistem SIPD ini tentunya yang utama dalam laporan yang ada di akuntansi adalah laporan keuangan”.⁵²

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa kebutuhan laporan keuangan untuk pemerintah daerah dapat dihasilkan dalam sistem SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) dimana terdapat laporan keuangan yang telah dilaporkan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi maka penyampaian informasi keuangan lebih efektif dan tepat pada pengguna laporan keuangan. Adanya laporan keuangan sangat krusial untuk mengukur kinerja suatu bisnis atau perusahaan dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk langkah berikutnya.

⁵¹ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁵² Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Sistem informasi pemerintah daerah menghasilkan 7(tujuh) laporan keuangan jadi, semua laporan kecuali CaLK (catatan atas laporan keuangan) karena CaLK itu sifatnya penjelasan makanya dia sulit untuk beasistem tapi angka-angkanya semua beasistem Cuma penjelasannya itu dibuat di Word karena dia berupa deskripsi”.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmansyah menjelaskan bahwa SIPD menghasilkan 7(tujuh) laporan keuangan seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadli Yakub kecuali CaLK, karena CaLK itu bersifat penjelasan atau deskripsi dimana penjelasannya bisa dibuat di Word. Laporan keuangan berisikan sederet informasi penting yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji di dalamnya dapat di pertimbangkan untuk menyusun rencana atau tindakan dimasa depan.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi

“Dalam ketujuh laporan yang dihasilkan pemerintah daerah CaLK ini terakhir yang menjelaskan keenam laporan secara deskriptif, gabungan dari angka dan uraian”.⁵⁴

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari 7(tujuh) laporan. Laporan yang terakhir yaitu CaLK sifatnya hanya penjelasan jadi sulit untuk di laporkan dalam beasistem karena dia berupa deskripsi mengenai pencatatan yang dicapai dalam bentuk angka. Seluruh media pelaporan ini berguna sebagai penilai kondisi keuangan kedepannya. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya.

⁵³ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁵⁴ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai dalam pencatatan sistem informasi akuntansi, kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam menyusun laporan?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

“Kendala apa saja yang di hadapi pemerintah, kendalanya banyak mulai dari SDM(sumber daya manusia) khususnya terkait dengan tenaga akuntansi itu masih menjadi kendala terus kendala terkait dengan pemahaman IT(teknologi informasi)”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa kendala yang terjadi dalam menyusun laporan keuangan ada beberapa yaitu SDM(sumber daya manusia) terutama pada tenaga akuntansi dan IT(teknologi informasi) yang masih kurang pemahamannya. Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) masih perlu diperhatikan terkhusus kepada seluruh pegawai yang mengelola aplikasi karena belum terlalu memahami sistemnya, untuk itu perlu dilakukan pemahaman lebih lanjut demi peningkatan sumber daya manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), karena pekerjaan yang ada di dalamnya berkaitan dengan keuangan yang tidak semua orang mudah dan paham mengenai keuangan. Selain itu, dari segi kuantitas, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kekurangan sumber daya manusia yang memadai yang memadai karena masih ada yang *double job* dalam melakukan pekerjaannya.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Beberapa kendala yang di hadapi yaitu adanya perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data pemerintah daerah”.⁵⁶

⁵⁵ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁵⁶ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyusun laporan karena adanya perbedaan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian data laporan dari pemerintah daerah ke pusat. Dalam realisasinya masih banyak persoalan dan kendala implementasi yang disebabkan dalam menyusun laporan keuangan dan juga pada aturan pelaksanaannya yang selalu berubah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus pandai menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berskala atas capaian daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Penyusunan laporan keuangan kendalanya itu kalau banyak transaksi tidak sesuai dengan bukti transaksi kalau ada kesalahan kemudian transaksi kadang-kadang seperti pencatatan gaji itu ada yang beda rekeningnya jadi kalau dia berbeda dengan anggarannya itu kadang sulit mencatat transaksi di sistemnya karena ada perbedaan rekening dan itu harus menunggu proses perubahan baru bisa diubah kurang lebih perubahannya sekitar tiga bulan”.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah, yang menjadi kendala pada pemerintah daerah yaitu pada saat pencatatan gajian karena banyak transaksi yang tidak sesuai dengan bukti transaksi biasanya terjadi karena beda rekeningnya sehingga harus menunggu proses perubahan baru bisa diubah agar dalam mencatat transaksi di sistem itu sudah sesuai. *Devise* sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berada di pusat sehingga jika terjadi kesalahan dalam penginputan tidak dapat dihapus atau diulang karena sistemnya langsung terinput. Untuk itu, harus melakukan pengajuan perbaikan ke pusat karena sistem semuanya di awasi dan di kontrol oleh pusat. Pemerintah daerah hanya bisa melakukan kordinasi Via online dan respon pusat dalam

⁵⁷ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

menanggapi kesalahan penginputan ini terbilang lama paling cepat sekitar tiga bulan karena seluruh Indonesia yang ditanganinya.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi

“Yah kendalanya seperti itu yang banyak terjadi seperti masih ada beberapa pemahaman teknologi informasi dalam sistem yang digunakan sehingga memperlambat beberapa pelaporan yang harus dilaporkan”.⁵⁸

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa di instansi ini sendiri sebelum dilakukan penerapan terlebih dahulu tidak di uji coba kajian ataupun diklat khusus selaku pengguna sistem, tetapi pemerintah daerah hanya sekedar melaksanakan sosialisasi. Cuma saja dikasih rentang waktu penginputan dan mekanisme penginputan secara online. Sebenarnya disinilah lelahnya sebab, belum siap menggunakan aplikasi berbasis online. Dikarenakan seluruh step by step online. Jadi menginput lewat website khusus yang telah diberikan kepada setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran. Sebenarnya pegawai sangat terbantu dan mempermudah pekerjaan dalam menggunakan sistem ini. Hanya saja di instansi tersebut dalam prosesnya masih kurang memahami penggunaannya secara menyeluruh. Hal ini diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap instansi namun dalam perjalanan suatu program pemerintah tentunya ada yang berjalan mulus dan juga ada yang mengalami banyak kendala. Seperti kendala kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi yang masih kurang pemahaman dalam menjalankan sistem sehingga memperlambat beberapa pelaporan yang harus dilaporkan.

⁵⁸ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai apa sajakah program, target, dan pelaksanaan dalam hal pengembangan sistem informasi akuntansi?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

“Sebenarnya terkait mengenai program sistem informasi pengampuh atau pemegang kuasa terkait dengan aplikasi yang kami laksanakan itu ada di pusat jadi pemerintah daerah itu hanya menjalankan atau melaporkan hasil dari pelaporan keuangan serta kinerja keuangan, jadi kita sebagai pengejar targetnya sedangkan program dan pengembangannya terkait dengan aplikasi sistemnya itu dari pusat semua”.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa mengenai pelaksanaan dalam hal pengembangan sistem informasi akuntansi kami pihak pemerintah daerah itu hanya menjalankan atau melaporkan hasil pelaporan keuangan sedangkan mengenai pengembangan aplikasinya itu sendiri dilakukan oleh pusat. Mengenai ketetapan sasaran program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada BKAD masih dikatakan sudah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, karena tujuan dari SIPD ini adalah lebih efektifnya urusan pemerintahan daerah, lebih transparansinya kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah efisiensi waktu yang dapat di minimalisirkan dengan adanya program SIPD ini sehingga pemantauan dari pusat lebih mudah. Walau dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, itu bisa membuat para pegawai yang melaksanakan program SIPD ini lebih memahami dan mengerti sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat lebih menyeluruh atau bahkan bisa dikatakan sudah dapat dirasakan hasilnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Bicara mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi ini adalah menjalankan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya mengingat aplikasi yang kami jalankan di pemerintah daerah itu berasal dari pusat baru beroperasi pada tahun ini jadi masih proses pengembangan untuk tahun yang akan datang kalau

⁵⁹ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

programnya yah itu tadi aplikasi yang kami gunakan dan targetnya masih kami jalankan untuk melihat hasil kedepannya”.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa dalam pengembangan sistem informasi akuntansi program yang digunakan berasal dari pusat yang menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik yang targetnya sekarang merupakan bahan pertimbangan untuk melihat hasil kedepannya. Bagaimana dalam pelaksanaan suatu program harus sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan agar proses yang ada dalam SIPD berjalan lancar dan maksimal. Dari hal tersebut dapat dilihat dan dapat dikatakan segala suatu kegiatan yang ada di pemerintahan sudah ada jadwal yang ditentukan sebelumnya, sehingga sebisa mungkin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan sehingga menjadikan hal ini hambatan dan membuat suatu kegiatan sedikit mundur dari jadwal yang ada sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“program, target, dan pengembangan sistem informasi akuntansi tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung meskipun programnya berasal dari pusat tapi membutuhkan berbagai persiapan di pemerintah daerah selain aplikasi dari pusat namun kesiapan perangkat keras dan beberapa fasilitas terkait lainnya juga perlu disiapkan di pemerintah daerah sehingga program, target, dan pengembangan yang dijalankan berjalan dengan semestinya”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah, agar program dan pengembangan sistem informasi akuntansi berjalan lancar juga membutuhkan persiapan dari pemerintah daerah terkait dengan perlengkapan perangkat keras dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan dalam pelaksanaan SIPD ini, BKAD agar berjalan sesuai jadwalnya dan sarannya

⁶⁰ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁶¹ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

sudah menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk digunakan diantaranya memiliki komputer yang masih bagus dan juga hampir diseluruh meja pegawai disediakan komputer, kemudian jaringan wifi yang tersedia, dan ruang kerja yang nyaman.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi

“Sistem informasi akuntansi menjadi satu kesatuan itu pengembangannya atau outputnya yang menjadi pemegang kuasa terkait dengan aplikasi itu ada di pusat jadi pemerintah daerah bagaimana melatih atau bagaimana memanfaatkan teknologi informasi itu sebaik-baiknya, pengembangan sumber daya manusia juga tentunya harus di kembangkan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah”.⁶²

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi pemegang kuasa terkait dengan program aplikasi yang dilaksanakan itu ada dipusat jadi pemerintah daerah itu hanya menjalankan atau melaporkan hasil dari pelaporan keuangan serta kinerja keuangan, berbagai persiapan dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan targetnya agar berjalan dengan lancar seperti mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) yang sudah melaksanakan pelatihan untuk menjalankan sistem yang baru dan juga perangkat keras serta fasilitas-fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Tentu adanya perubahan yang dirasakan dengan sebelum penggunaan SIPD ini, SIPD ini lebih banyak memangkas kegiatan dari saat sebelum menggunakan SIPD, seperti perencanaan, penganggaran serta penatausahaan dalam pekerjaan dan pelaporannya masing-masing. Sekarang dalam satu aplikasi SIPD sudah terangkum segala kegiatan dan juga lebih mudah diawasi kegiatannya karena langsung terhubung ke pusat, lebih transparansi, lebih profesional dan efisien.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan?

⁶² Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan
“Karena sistem pengolahan sudah ada aplikasinya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) selanjutnya harus ada peningkatan SDM (sumber daya manusia) kemudian juga bagaimana pengolahan keuangan yang efektif dan efisien”.⁶³

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa terdapatnya SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) pengolahan, perencanaan, dan penganggaran daerah dirasa semakin efektif. Diharapkan juga agar adanya keterbukaan data, keterbukaan sistem informasi akuntansi. Pengelolaan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) juga memiliki proses tertentu guna mempermudah pekerjaan setiap instansi dalam menginput data. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan sudah menggunakan aplikasi SIPD dan harus ada peningkatan SDM (sumber daya manusia) agar pengolahan keuangan menjadi efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Peningkatan kualitas pengelolaan daerah dengan penyusunan laporan keuangan, upaya-upaya peningkatan kinerja di pemerintah daerah kan ada namanya anggaran berbasis kinerja semua anggaran yang dibuat dalam laporan kegiatan itu semua sudah jelas outputnya dan harus mampu mengukur input, output dengan target outputnya itulah yang menjadi anggaran berbasis kinerja yang dilakukan melalui proses penyusunan perencanaan sampai sudah harus diukur kegiatan ini sekian outputnya, apa program kegiatan itu harus berbasis output yang jelas”.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa upaya-upaya pengukuran kinerja keuangan di pemerintah daerah ada yang namanya sistem anggaran berbasis kinerja yaitu terciptanya transparansi dan meningkatnya akuntabilitas atas pelaksanaan penyusunan anggaran yang mampu mengukur input,

⁶³ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁶⁴ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

output dengan target outputnya melalui sistem penganggaran yang tepat tentu akan mengubah tata kelola di dalam pemerintahan termasuk juga bisa meningkatkan kinerja secara optimal.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Upaya peningkatan yang dilakukan pemerintah daerah adalah peningkatan pelaporan kinerja keuangan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu pelaporan kinerja keuangan tepat waktu, efisien, transparan dan akuntabel. Tersedianya teknologi informasi melalui aplikasi SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat. Dengan pengetahuan, berbagai kemajuan teknologi informasi yang pesat dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola sistem informasi secara akurat.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi

“Upaya peningkatan yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu mengoptimalkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan serta peningkatan relasi dan wawasan aparatur dan optimalisasi penggunaan IT (teknologi informasi)”.⁶⁶

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa pentingnya pengetahuan aparatur agar dalam penggunaan teknologi informasi dapat teroptimalkan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan menjadi efektif, efisien, dan akuntabel. Pelatihan terkait penggunaan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) akan terus dilakukan baik secara formal atau nonformal. Secara

⁶⁵ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁶⁶ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

formal, pelatihan akan dilakukan pada seluruh pegawai dengan mendatangkan langsung pegawai dari pusat dalam menjalankan penggunaan aplikasi dan untuk pelatihan secara nonformal, bisa dilakukan dengan mempelajarinya sendiri melalui internet atau yang sudah paham dan lihai bisa saling mengajari satu sama lain. Jika sehari-hari tidak mengerti atau lupa cara dalam penggunaan aplikasi serta untuk SKPD lain bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKAD baik secara formal atau nonformal. Terkait penambahan pegawai yang mengelola SIPD akan dilakukan dengan cara di tes kemampuan dan juga kemampuan teknologi informasinya.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

“Karena laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu entitas pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah maka faktor penghambat yang dihadapi biasanya dari sumber daya manusia itu sendiri yang masih kurang dalam menguasai pelaksanaan sistemnya atau diluar itu, sedangkan faktor pendukung yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan yaitu memberikan sarana pelatihan di bidang akuntansi berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga pelatihan akuntansi akan memberikan pengetahuan dan pemahaman secara praktik di dalam menyusun laporan keuangan dan meningkatkan kemampuan dari para pengelola”.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat yaitu SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu memberikan pelatihan dibidang akuntansi yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan. jika sistem informasi tidak memberikan informasi yang spesifik dan akurat tentang laporan keuangan akan menghambat dalam pencapaian yang diharapkan. Semakin akurat dan tepat sistem

⁶⁷ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

informasi akuntansi maka akan lebih tepat mengambil keputusan. Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang yang mengacu pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Yang pertama sistemnya itu dulu karena kan satu sistem yang harus dihadapi sama pemerintah pusat sementara sistemnya itu kan dia masih dikembangkan terus jadi kadang-kadang ada beberapa laporan yang dibutuhkan tapi outputnya belum tersedia sedangkan faktor pendukungnya sekarang sudah ada beberapa peralatan yang dibutuhkan atau mau diganti disediakan anggarannya termasuk fasilitas apa yang dibutuhkan itu juga bisa disediakan”.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kinerja keuangan yang pertama yang harus disediakan itu sistemnya yang memadai baik outputnya maupun inputnya, agar kelancaran dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak ada lagi hambatan. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung dalam menjalankan program seperti peralatan perlu di perhatikan dan juga anggaran yang disediakan digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai pendukung kelancaran dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Faktor penghambatnya itu berada di sistemnya kemudian yang mengelola juga kadang masih minim pengetahuan mengenai aplikasi yang digunakan karena ini kan aplikasinya sebenarnya pengaplikasiannya tahun depan sudah bisa digunakan tahun ini istilahnya masa transisi selanjutnya mengenai faktor pendukungnya itu juga sudah memadai dan tidak terlepas dari komponen sistem informasi akuntansi adalah software (perangkat lunak) yang difasilitasi yang dapat membantu mempermudah mengolah data transaksi keuangan pemerintah menjadi efektif dan efisien”.⁶⁹

⁶⁸ Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁶⁹ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan tentang program aplikasi yang digunakan sedangkan perangkat lunak (software) yang tidak memadai serta fasilitas yang mendukung dan mempermudah dalam pengolahan data transaksi keuangan kurangnya pengetahuan tentang aplikasi yang digunakan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pengaplikasian aplikasi tersebut. Hambatan ini juga menjadi tugas pemerintah untuk memecahkan atau mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Perangkat lunak juga sangat berperan penting dalam proses penginputan sistem informasi akuntansi..

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi “Dalam pengalokasian anggaran, terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan di berbagai program lainnya. Sedangkan faktor pendukung tetap adanya fasilitas yang diberikan sehingga bisa terlaksana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan”.⁷⁰

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa seharusnya anggaran yang disediakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan dipergunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Anggaran yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dengan baik guna mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat. Anggaran tersebut menjadi sangat penting dalam pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah. Anggaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja keuangan. Penerapan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil.

⁷⁰ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan pemerintah?

Bapak Fadli Yakub selaku kepala bidang akuntansi dan pelaporan

“Dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah tentunya berkaitan dengan apa yang kami laksanakan seperti bentuk dari tanggungjawab kami yaitu menyusun laporan neraca keuangan daerah sesuai dengan bukti kas transaksi mengenai pendapatan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian terkait dengan prinsip keadilan dan kebenaran yaitu memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar segala yang dilaksanakan diketahui bahwa benar adanya tugas yang di jalankan sebaik-baiknya”.⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Yakub menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Prinsip akuntansi syariah dalam pemerintah daerah yaitu tanggungjawab atas penyusunan laporan neraca keuangan daerah sudah sesuai dengan bukti kas transaksi, sedangkan mengenai prinsip keadilan dan kebenaran yaitu dengan memantau, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas.

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Widhiani selaku kasubid akuntansi dan pelaporan

“Prinsip pertanggungjawaban pastinya dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan kebenaran bukti kas transaksi, dan juga dalam prinsip keadilan mampu dibuktikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan semua pegawai yang ada di setiap bagian”.⁷²

⁷¹ Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁷² Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Berdasarkan penjelasan Ibu Yovita Widhiani menjelaskan bahwa dalam prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan kinerja keuangan dapat dibuktikan dengan laporan keuangan dan laporan kinerja bukan hanya laporan tahunan tapi juga dengan laporan kinerja setiap bulan dan juga dibuktikan dengan tugas dan fungsi aparatur yang dijalankan di setiap bidang. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian amanah kepada seseorang pejabat publik.

Hasil wawancara dengan Bapak Darmansyah selaku staf bidang akuntansi dan pelaporan

“Tanggungjawab kami sebagai bagian dari pelaporan dan akuntansi tentunya melaporkan laporan keuangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya rekayasa berdasarkan bukti transaksi pendapatan dan pengeluaran dan prinsip keadilan apabila kami melakukan kesalahan tentunya akan diberikan surat peringatan dan sanksi untuk semua pegawai apabila lalai dalam menjalankan tugas”.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmansyah menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana prinsip pertanggungjawaban dibuktikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan semua pegawai yang ada setiap bidang dengan kesesuaian dan kebenaran bukti kas transaksi. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Selanjutnya Bapak Tajuddin selaku kasubid pelaporan dan informasi

“Prinsip pertanggungjawaban dijalankan dalam bentuk laporan keuangan kemudian prinsip keadilan yaitu setiap pegawai mengikuti arahan dan bimbingan

⁷³ Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

dari kepala seksi dan akan dilaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, dan mengevaluasi kinerjanya, sedangkan prinsip kebenaran adalah melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar”.⁷⁴

Hasil wawancara Bapak Tajuddin menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan amanah dapat dilihat dari laporan keuangan dari setiap aparatur wajib melaporkan capaian kinerjanya setiap bulan dan dipantau serta di evaluasi kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

B. Pembahasan

Sistem informasi akuntansi (SIA) selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapat informasi, menganalisis dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggung jawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level-level manajemen dibawahnya dan karyawan pelaksana. Pertanggung jawaban tersebut akan berjalan lancar dengan bantuan suatu sistem yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan transaksi yang terjadi dengan sistematis, teratur, baku dan mudah.⁷⁵

Penerapan sistem (*system implementation*) merupakan tahap peletakan sistem agar siap untuk dioperasikan. Perencanaan dasar dalam kegiatan penerapan sistem informasi akuntansi antara lain:

1. Persiapan implementasi sistem

Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Kesuksesan pengembangan sistem besar

⁷⁴ Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

⁷⁵ Anna Marina et al., *Sistem Informasi Akuntansi : Teori Dan Praktikal* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017). hal. 32

pengaruhnya ditentukan oleh perencanaan implementasi yang disusun dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

2. Pendidikan dan pelatihan karyawan

Dalam hal ini karyawan dapat digolongkan menjadi karyawan pemakai informasi dan karyawan pelaksana sistem, yang mana keduanya harus mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan atas sistem yang baru.

3. Konversi sistem, terdiri dari:

a. Konversi langsung

Penerapan sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama.

b. Konversi paralel

Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu.

c. Konversi modular (pendekatan pilot project)

Implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian.

d. Konversi phase-in

Hampir sama dengan konversi modular, yang membedakan adalah pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedang phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri.⁷⁶

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*) dapat dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang berkualitas, oleh karena itu terdapat hubungan positif antara kualitas informasi dengan kinerja perusahaan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

⁷⁶ Siti Suharni and Syarifah Ratih Kartika Sari, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Di Kota Madiun," *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2019): 53–63.

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.⁷⁷

Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seuruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.⁷⁸

Bagian-bagian laporan keuangan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidrap :

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BKAD Kabupaten Sidrap mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan

⁷⁷ SAP Standar Akuntansi Pemerintah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). hal. 31-33

⁷⁸ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. hal. 3

- e. Investasi jangka panjang
 - f. Aset tetap
 - g. Kewajiban jangka pendek
 - h. Kewajiban jangka panjang
 - i. Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Sidrap yang kemudian dibandingkan dengan anggaran.
- Laporan realisasi anggaran mencantumkan pos-pos berikut :
- a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
3. Laporan Operasional (LO)
- LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan operasional mencantumkan pos-pos berikut :
- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari kegiatan operasional
 - c. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada
 - d. Pos luar biasa, bila ada
 - e. Surplus/defisit-LO⁷⁹
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

⁷⁹ Republik Indonesia, “Standar Akuntansi Pemerintahan,” *Peraturan Pemerintah 71 (2010)*: 160–73.

CaLK menyediakan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Analisis laporan keuangan berarti: “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. Bagi organisasi privat, analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi:

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek.
2. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur.
3. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.⁸⁰

Laporan keuangan ialah proses akuntansi perusahaan yang dicatat yang kemudian digunakan menjadi alat untuk memberitahu kepada pihak yang berkepentingan bagaimana data keuangan dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan informasi yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan dengan memiliki laporan keuangan, informasi tersebut nantinya dapat memberikan bantuan untuk membuat keputusan ekonomi yang

⁸⁰ Joko Pramono, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta),” *Among Makarti* 7, no. 1 (2014).

sifatnya financial kepada penggunanya. Secara umum dengan demikian dapat dimengerti bagaimana laporan keuangan merupakan catatan akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan.⁸¹

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas ini bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Mardiasmo menyatakan bahwa *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E (ekonomi, efisiensi, efektivitas).⁸²

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

⁸¹ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020). hal. 9-10

⁸² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta, 2009).

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).⁸³

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.⁸⁴

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menyangkut kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah untuk mempublikasi dan

⁸³ Aulia Rizka Kusuma and Nur Handayani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 1 (2017).

⁸⁴ Fakultas Sosial Sains, "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah," *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* " *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2018): 21–46.

mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dibuatnya kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik melalui kinerjanya dapat diukur dan di pertanggungjawabkan. Tranparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan, yang pertama dimensi kewajiban pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan), menunjukkan apa yang dilakukan itu dalam bentuk laporan atau penjelasan, yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat. Yang kedua berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah, karena setiap tahapan proses-proses pengelolaan pemerintah selalu menginformasikannya kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki pula hak untuk melakukan kontrol terhadap setiap proses itu.

Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (Accountability)

Pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam artian keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Prinsip pertanggungjawaban ini berkaitan atau berimplikasi secara langsung dengan konsep amanah dimana dalam bisnis dan akuntansi individu yang terlibat langsung harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dalam bentuk laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddassir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan”.⁸⁵

Dalam konsep pertanggungjawaban berkaitan dengan ayat diatas diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung dan menjawab dalam arti lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat dari perilaku seseorang untuk menyelesaikan masalah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan apabila seseorang memperoleh apa yang haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap melakukan prinsip transparan dan akuntabel dimana prinsip transparansi ini harus bersifat adil kepada semua orang berdasarkan realita yang ada.

Berdasarkan pada prinsip keadilan tersebut. Sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

⁸⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), Al-Muddassir : 38.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁸⁶

Keadilan terletak pada keharmonisan menurut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntansi dalam praktek wajib mengukur semuanya dengan tanggungjawab, benar, dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam implementasinya prinsip kebenaran tidaklah lepas dari prinsip keadilan dan pertanggungjawaban dimana untuk mengukur kebenaran maka perlu mengukur pertanggungjawaban dan keadilan.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁸⁷

⁸⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), An-Nahl : 90.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), h. 180.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam prinsip amanat dan pertanggungjawaban dapat dilihat sebagai fitrah kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan bersifat adil dengan segala sesuatu sehingga terbentuknya pertanggungjawaban kita karena telah siap dilahirkan ke dunia ini.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maisur Nyak Umar 2019 “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial”, memiliki persamaan yang mana hasil dari penelitian Maisur Nyak Umar menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan bahwa dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dari berbagai komponen. Penggunaan sistem informasi tidak hanya mempermudah bagi para manajer, namun terhadap para karyawan juga sangat dirasakan dan begitupun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam proses dan alur kegiatan akuntansi lebih efektif, efisien, dan lebih akurat dengan itu mampu memberikan efek yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yenni Vera Fibriyanti 2017 “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya)”, bertolak belakang dengan penelitian ini karena bagian akuntansi masih bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan serta masih bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan membuat rekap daftar hadir karyawan sehingga memungkinkan ada penyelewengan. Sedangkan penelitian ini sangat efektif karena adanya sistem aplikasi yang memudahkan dalam setiap pekerjaan dan dapat mengefisienkan waktu sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam proses pekerjaan dan pengelolaan keuangan menjadi efektif, efisien, dan transparansi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan terkait Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah). Maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap penyajian laporan kinerja keuangan sudah diterapkan dengan baik dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang sudah terintegrasi dan terinterkoneksi sehingga pencatatan laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan dapat lebih cepat dan tepat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan sudah ditingkatkan melalui pelatihan akuntansi, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang membantu mempermudah penerapan sistem informasi menjadi efektif dan efisien.
3. Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja keuangan, yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

B. Saran

1. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidrap diharapkan mempertahankan atau meningkatkan sumber daya baik eksternal maupun internal dan lebih mempermudah kebutuhan-kebutuhan kantor agar lebih memadai dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada lembaga lain karena mengingat bahwa sistem informasi akuntansi pada setiap lembaga atau perusahaan sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim*
- Adriyani, Dina Fatma. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1." *Di Akses Pada* 12 (2003).
- Akbar, Dendy Syaiful, and Ruhayat Ruhayat. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah." *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2018).
- Aripin, Zaenal. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2021.
- Bahri, Syaiful. *Analisis Laporan Keuangan*. Jawa Barat: CV MEDIA SAINS INDONESIA, 2023.
- Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 20, no. 1 (2013).
- Djahir, Yulia. "Sistem Informasi Manajemen," h.14. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- dkk, Renika Hasibuan. "Sistem Akuntansi," h.33-37. Padang Sumatera Barat: PT GBLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Effendi, Syahril. *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah*. CV BATAM PUBLISHER, 2021.
- Fahri, Zukhruf, and Juliana Nasution. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum Kantor Walikota Medan." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 9, no. 2 (2021).
- Fibriyanti, Yenni Vera. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 2, no. 1 (2017).
- Fitra, Halkadri. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH, 2019.
- Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*. GUEPEDIA, n.d.
- Hadiutomo, Kusno. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2021.
- Hanike, Yusrianti, and Damirah Damirah. "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan Struktural Equation Model-Partial Least Square." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2019).
- Harahap, Sri Belia. *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Hsb, Fitriyah Nur, and Hazmanan Khair. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen Dan Keterampilan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kominfo Labuhanbatu Utara." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 5, no. 1 (2021).

- Hutabarat, Francis. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Indonesia, Republik. “Standar Akuntansi Pemerintahan.” *Peraturan Pemerintah 71* (2010).
- Jati, Budhi Purwanto, and Takrisia Umara Pangestu. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.” *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 24, no. 2 (2021).
- Kusuma, Aulia Rizka, and Nur Handayani. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 1 (2017).
- Lestari, Tri. *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial*. Jakarta Selatan: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023.
- Lukiman, Renaldy, and J B Widodo Lestarianto. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu Karyawan.” *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi* 8, no. 2 (2016).
- Mardia, Rahman Tanjung, Abdul Karim, Marthinus Ismail Elmor Benedict Waigu, Eko Sudarmanto, Supitriyani Jay Idoan Sihotang, Sri Martina, Elfina Okto Posmaida Damanik Bonaraja Purba, and Dewa Putu Yudhi Ardiana. *Sistem Informasi Akuntansi & Bisnis*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, 2009.
- Marina, Anna, Sentot Imam Wahjono, Ma’ruf Syaban, and Agusdiwana Suarni. *Sistem Informasi Akuntansi : Teori Dan Praktikal*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017.
- Metodologi, Lexy J. “Penelitian Kualitatif.” *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*, 2000.
- Mia Lasmi Wardiyah. “Akuntansi Keuangan Menengah,” h.70. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.
- Nako, Natalie. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.” *UAJY*, 2016.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, 2009.
- Prabowo, Galang Rahadian, Amir Mahmud, and Henny Murtini. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung).” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 1 (2014).
- Pramono, Joko. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).” *Among Makarti* 7, no. 1 (2014).
- R.A. Supriyono. “Akuntansi Keperilakuan,” h.4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Rafli, Riri Yulianty. “Pengaruh Pelatihan Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Perusahaan

- BUMN Di Kota Padang).” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2013).
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Sains, Fakultas Sosial. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.” *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.*” *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2018).
- SAP Standar Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Sarfina, Firman, and Andi Ayu Frihatni. “Implementation of Accounting Information System The Selling in PT. Sepuluh Perkasa Bersatu Unggul Sidrap (Accounting Sharia Analysis),” n.d.
- Semaun, Syahriyah. “Aspek Hukum Dalam Audit Koprasi.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (2010).
- Sinaga, Onita Sari, Abdurrozzaq Hasibuan, Efendi, Eko Priyojadmika, Marisi Butarbutar, Sukarman Purba, Karwanto, Marto Silalahi, A. Nururochman Hidayatulloh, and Muliana. *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Siti Munasasa Hidayat. “Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai GAS LPG Pada PT. RUKUN.” *Politeknik Komputer Niaga LPKIA Bandung*, 2018.
- Sugiono, Arief, Yanuar Nanok Soenarno, and Synthia Madya Kusuma Kusumawati. *Akuntansi & Pelaporan Keuangan*. GRASINDO, n.d.
- Suharni, Siti, and Syarifah Ratih Kartika Sari. “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Di Kota Madiun.” *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 8, no. 2 (2019).
- Suhud, Sheilla Puteri, and Abdul Rohman. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota Bandung.” Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015.
- Syarifuddin, Ahmad Dzul Ilmi. “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih Program Studi Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare.” *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023).
- Tumalun, Tommy L H, and Sonny Pangerapan. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Di PT Nusantara Sakti Cabang Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019).
- Umar, Maisur Nyak. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial (Study Kasus Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kabupaten Pidie).” *Jurnal Real Riset* 1, no. 1 (2019).
- Zubair, Muhammad Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, and Muhammad Qadaruddin. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare, 2020.

Wawancara

Fadli Yakub, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Yovita Widhiani, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Darmansyah, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).

Tajuddin, Kasubid Pelaporan dan Informasi, Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap, wawancara pada (26 Juli 2023).





LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4542/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURKADRI. ARW
Tempat/ Tgl. Lahir : LT. SALO SIDRAP, 20-09-2001
NIM : 19.2800.025
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : MACORAWALIE, PANCA RIJANG, SIDENRENG
RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 21-Juli-23

Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

2. Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 387/IP/DPMPTSP/7/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURKADRI. ARW** Tanggal **24-07-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.4542/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/20** Tanggal **21-07-2023**

MENGIZINKAN

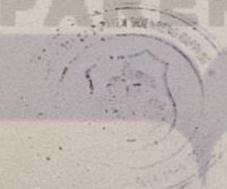
KEPADA
NAMA : NURKADRI. ARW
ALAMAT : JL. LAKKO, KEL. MACORAWALIE, KEC. PANCA RIJANG
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

LOKASI PENELITIAN : KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 26 Juli 2023 s.d 26 Agustus 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 02-08-2023

Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

1. KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
3. PERTINGGAL

3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. HARAPAN BARU KOMPLKS SKPD BLOK A NO.3 KAB. SIDRAP
 SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :903/ 446/BKAD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI RAHMAT SALEH , SE.M.Si**
 Nip : 19781116 200312 1 005
 Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidrap

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindetitas :

Nama : **NURKADRI. ARW**
 Nim : 19.2800.025
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare- Pare

Benar-benar telah melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terhitung mulai pada tanggal 26 Juli s/d 26 Agustus 2023, untuk memperoleh data kuantitatif dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :

“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDRAP “ ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 12 September 2023

KEPALA BKAD

ANDI RAHMAT SALEH, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I,IV/b
 Nip : 19781116 200312 1 005

4. Pedoman Wawancara

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307</p>
VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : NURKADRI. ARW

NIM : 19. 2800.025

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
 KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 SIDRAP (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara pegawai/staff pada kantor bupati kabupaten sidrap

1. Bagaimana sistem akuntansi keuangan di pemerintah daerah?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam mengukur kinerja keuangan?
3. Laporan apa saja yang dihasilkan dalam sistem Informasi akuntansi?
4. Dalam pencatatan sistem informasi akuntansi, kendala apa saja yang di hadapi pemerintah dalam menyusun laporan?
5. Apa sajakah program, target, dan pelaksanaan dalam hal pengembangan sistem informasi akuntansi?

6. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan?
7. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan?
8. Bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi dan kinerja keuangan pemerintah?

Parepare, 27 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP: 19711111 199803 2 003

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.

NIP: 19911030 201903 1 006

PAREPARE

5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *FADLI YACUB, ST, Ak. M. Adm. Pemb.*

Alamat : *Jl. A. Sula Lijud Ampenit*

Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Jabatan : *Kepala Bidang. Akuntansi & pelaporan.*

Menerangkan bahwa

Nama : Nurkadri. Arw

NIM : 19.2800.025

Prodi : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2023

Fadli Yacub
FADLI YACUB

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : YOVITA WIDHIANI

Alamat : KOMP. SKPD GABUNGAN

Jenis Kelamin : WANITA

Jabatan : KASUBID AKUNTANSI

Menerangkan bahwa

Nama : Nurkadri. Arw

NIM : 19.2800.025

Prodi : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2023


YOVITA WIDHIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Darmansyah
Alamat : Jln. Jend. Sudirman Kel. Lakessi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Staf akuntansi dan Pelaporan

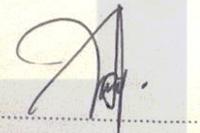
Menerangkan bahwa

Nama : Nurkadri. Arw
NIM : 19.2800.025
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tajuddin
Alamat : Batu Lempur
Jenis Kelamin : pria
Jabatan : kasubid pelaporan & informasi

Menerangkan bahwa

Nama : Nurkadri. Arw
NIM : 19.2800.025
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap, 26 Juli 2023



6. Gambaran Umum Kantor BKAD

Unit satuan kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

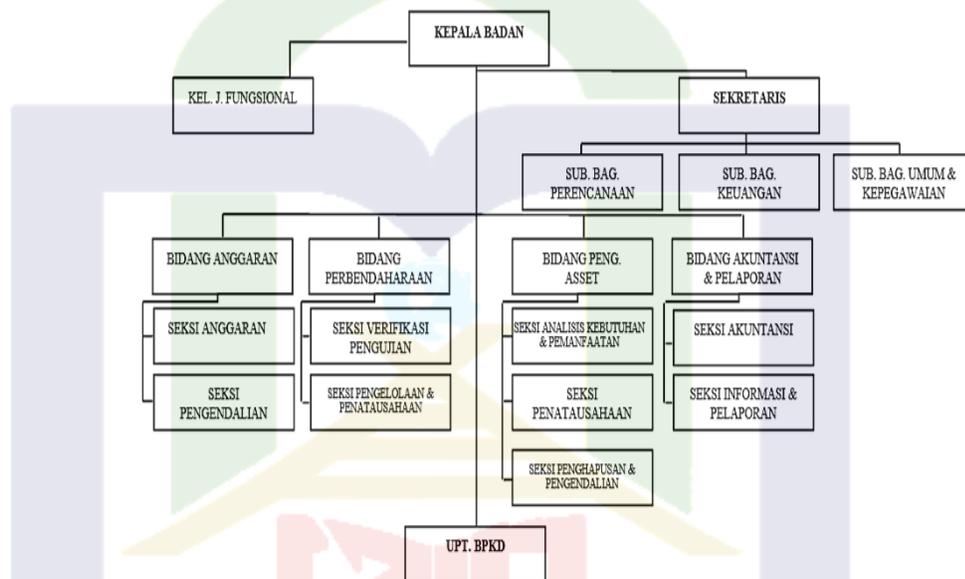
Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berubah struktur dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Unit Satuan Kerja Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang membawahi 1 Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, dan 8 Sub Bidang. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Pemangku Jabatan Eselon II b) yang selain sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana fungsi Bendahara Umum Daerah.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unit organisasi pemerintah daerah pelaksana fungsi staf yang bertugas merumuskan kebijakan umum dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, melaksanakan perbendaharaan, dan melaksanakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diperlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, pedoman, serta sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah rencana strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja, maka gambaran Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018-2023.

Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sidrap



Rumusan Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

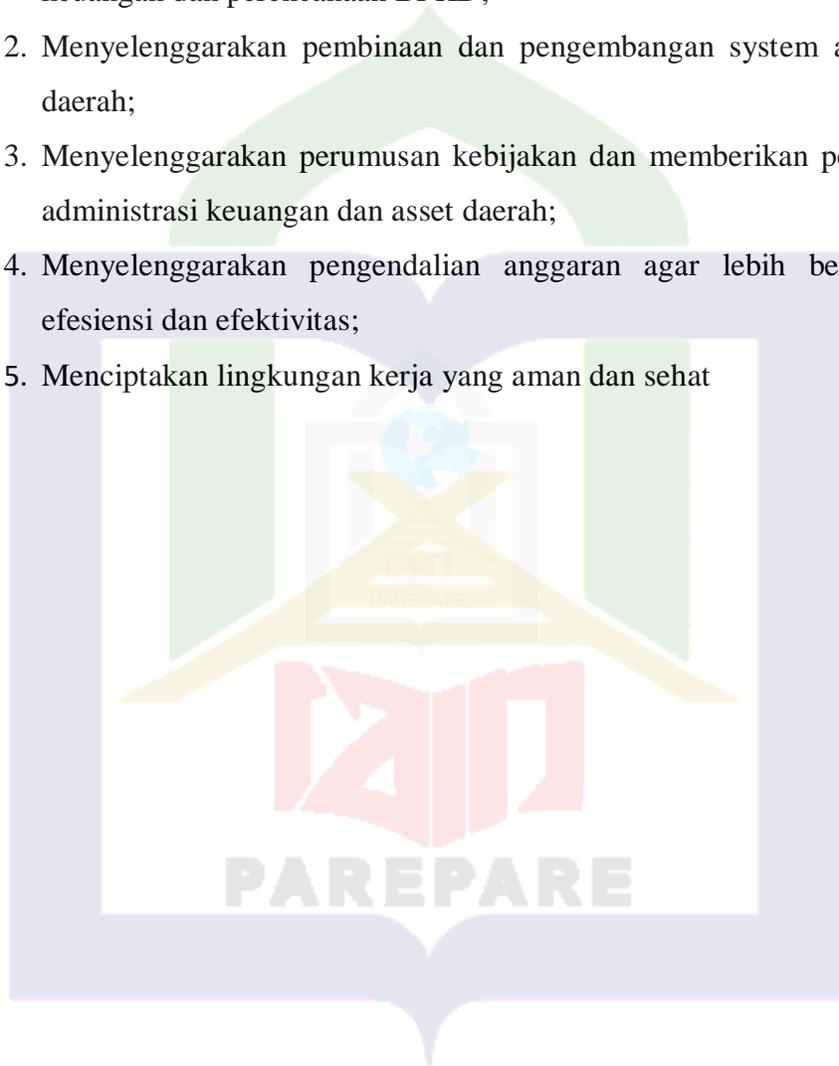
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesioanal”

Makna dari visi tersebut adalah upaya mewujudkan pengelolaan keuangan Keuangan Daerah peningkatan daerah melalui sumber daya aparatur yang bekerja secara profesional.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang telah ditetapkan diatas , maka

dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan dan perencanaan BPKD;
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan system anggaran daerah;
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan dan asset daerah;
4. Menyelenggarakan pengendalian anggaran agar lebih berorientasi efisiensi dan efektivitas;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat



7. Dokumentasi

a. Wawancara dengan kepala bidang akuntansi dan pelaporan



b. Wawancara dengan kasubid akuntansi dan pelaporan



c. Wawancara dengan staf akuntansi dan pelaporan



d. Wawancara dengan kasubid pelaporan dan informasi



BIOGRAFI PENULIS



NURKADRI. ARW, Lahir di Lt. Salo Sidrap. Pada tanggal 20 September 2001. Alamat Jl. Lakko, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Anton dan Ibu Rosmawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal BTN Rappang Permai selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Macorawalie selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di MTs YMPI Rappang selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sidrap selesai pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan syariah. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare di Kota Parepare Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah)”**.